

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah alat perjuangan masyarakat untuk menduduki pemerintahan, dimana anggota-anggotanya terorganisir dan terbentuk dari pandangan mengenai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Salah satu indikator dari negara demokrasi adalah partai politik dan pemilu. Keberadaan partai politik sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Melalui partai politik, dilakukan rekrutmen politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik baik di pemerintahan atau legislatif.

Partai politik terbentuk karena adanya ideologi yang sama, namun dalam pelaksanaannya ideologi yang sama tidak cukup untuk membentuk sebuah partai. Hal tersebut karena sesungguhnya di dalam sebuah partai masih terdapat perbedaan orientasi, cita-cita, nilai dan kehendak masing-masing individu. Inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam tubuh partai yang saat ini banyak terjadi. Konflik tidak bisa dihindarkan karena sejauh berdirinya sebuah partai pasti terdapat kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda satu sama lain.

Pujriyani dalam Mardihartono (2014: 56) menyatakan konflik adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan baik dari individu maupun kelompok tertentu. Sebagai wujud dari gejala sosial, konflik memang akan selalu ada pada setiap kehidupan karena antagonisme atau perbedaan yang menjadikan ciri penunjang terbentuknya suatu masyarakat sehingga perbedaan memang tidak bisa dihindari.

Hal di atas tersebut menjelaskan konflik menjadi salah satu karakteristik dalam kehidupan manusia yang sudah ada sejak dahulu sampai era globalisasi sekarang ini yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Konflik menjadi suatu hal yang menarik jika dibandingkan dengan bahasan lainnya dalam politik, karena pada umumnya politik itu sendiri adalah konflik atau paling tidak politik itu senantiasa berkaitan erat dengan konflik, karena sifat yang berbeda-beda tersebut yang memicu timbulnya pertentangan. Hal ini disebabkan adanya suatu keadaan kebutuhan ataupun kehendak yang ingin coba dipenuhi. Konflik ada di setiap bidang kehidupan manusia, ketika adanya kesenjangan yang memunculkan permasalahan, yang tidak dapat terelakan lagi, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya.

Hoogerwerf (1979: 240) menyatakan bahwa konflik politik adalah suatu keadaan dalam politik yang terjadi ketika seseorang atau kelompok berusaha menghalangi seseorang atau kelompok lain untuk kepentingannya dalam mencapai tujuan dari partai politik tersebut. Hal ini sejalan dengan Surbakti (1992: 151) bahwa konflik

politik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara sejumlah individu, kelompok dan organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat.

Brown dalam Jemadu (2008: 204) menyatakan bahwa konflik internal adalah konflik yang hanya dapat dijelaskan oleh satu faktor dan variabel. Adanya penekanan pada pengaruh kebijakan dan perilaku kader pemimpin sebagai pemicu timbulnya konflik internal, akan tetapi Brown tidak membantah mengenai faktor-faktor struktural, politik, ekonomi, budaya dan konseptual yang juga dapat membawa pengaruh konflik. Brown lebih berpandangan bahwa faktor perilaku pemimpin adalah hal yang paling berpengaruh untuk konflik internal.

Sejalan dengan itu pula konflik partai politik merupakan hal yang dapat ditemukan ketika dalam organisasi terdapat kondisi yang berubah, karena partai politik itu sendiri terorganisir dalam organisasi yang basis massanya sangat besar. Kemungkinan adanya konflik internal dengan berjalannya organisasi akan timbul ketika organisasi tersebut sudah tidak sejalan, sehingga partai politik dikatakan tidak memiliki keutuhan internal ketika terdapat perbedaan ideologi dan paham yang berbeda antar anggota partai. Adanya permasalahan di dalam partai seperti ini yang kemudian dapat menghambat kinerja partai politik tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan partai politik yaitu tercapainya visi misi dari partai bukan kepentingan politik kader partai.

Pembahasan di atas dapat menyimpulkan bahwa konflik dapat timbul dalam organisasi sebagai hasil dari adanya masalah terkait komunikasi, pribadi ataupun dari struktur organisasi. Seperti halnya di dalam partai politik, dimana adanya keterbatasan ataupun kesalahan dalam menjalankan organisasi yang tidak mampu mempertahankan jalannya organisasi tersebut maka, kekuasaan sekalipun tidak dapat mempengaruhinya untuk tetap ada di dalam organisasi partai politik yang saat ini banyak terjadi pemberhentian ketua-ketua partai.

Konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik adalah gejala dari dinamika politik yang akhir-akhir ini terjadi baik dari pusat maupun daerah, seperti yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik internal partai ini bermula dari kehadiran ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) pada kampanye partai Gerindra saat kampanye pileg lalu. Kehadiran SDA tersebut langsung mendapat tanggapan negatif dari beberapa kader-kader partai dan pengurus partai. Konflik tersebut berlanjut sampai adanya pemecatan pada sejumlah pengurus dan pemberhentian sementara SDA dari posisi ketua umum (<http://m.beritasatu.com/opini/tajuk/3336-pragmatisme-partai-partai.html>, diakses pada 28 april 2014).

Begitu pula yang terjadi pada Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung. Abdurachman Sarbini, Ketua DPW Provinsi Lampung yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, ini memperlihatkan bahwa kekuasaannya tidak dapat mempertahankan dirinya di dalam partai politik tersebut. H. Abdurachman Sarbini yang lebih dikenal dengan sebutan Mance yang menjabat sebagai ketua

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN, pemberhentiannya dilatarbelakangi upaya yang dilakukan demi efektifitas kinerja partai, juga berkaitan dengan disiplin partai dan asas kepatutan. Jika diulas bagaimana proses keterpilihan Abdurachman Sarbini sebagai ketua DPW PAN secara musyawarah mufakat pada musyawarah wilayah (Muswil) tahun 2010 lalu yang diwarnai kekisruhan dalam penentuan ketua DPW PAN. Abdurachman Sarbini yang lebih condong ke Partai lain daripada PAN, tiba-tiba terpilih menjadi ketua PAN. Kekisruhan ini terjadi ketika enam calon ketua masing-masing mengusulkan pemilihan berlangsung secara musyawarah, tetapi usulan itu ditolak Fikri Yasin sebagai kandidat lain yang menginginkan pemilihan berlangsung secara pemungutan suara. Usulan Fikri tersebut kemudian oleh pimpinan sidang diserahkan pada forum tetapi forum menyetujui jika pemilihan berlangsung melalui musyawarah mufakat (<http://m.antaralampung.com/berita/417173/dpp-pan-berhentikan-ketua-dpw-pan-lampung>, diakses pada 10 Februari 2014).

Keadaan di atas yang menyebabkan kekisruhan yang terjadi dari kubu Fikri yang tidak sependapat. Kemudian keadaan ini bisa ditenangkan ketika Alimin Abdullah yang merupakan anggota DPR RI mengambil alih sidang. Berdasarkan permasalahan saat berjalannya pemilihan ketua DPW terlihat bahwa kader-kader PAN sudah kehilangan arah dan kehabisan energi positif sehingga, memicu permasalahan maka wajar apabila sampai terjadi kekerasan fisik di tubuh partai antar calon ketua DPW PAN yang dilatarbelakangi kesalahpahaman.

Hal tersebut menggambarkan bahwa memang dari awal keterpilihan Abdurchman Sarbini sudah menimbulkan permasalahan yang harusnya tidak terjadi diawal-awal keterpilihannya. Kepemimpinan Abdurchman Sarbini di dalam tubuh DPW provinsi Lampung dianggap kurang baik setelah diadakan evaluasi kinerja dari DPP yang akhirnya mengambil upaya penyelesaian.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memberhentikan Ketua DPW PAN Lampung Abdurachman Sarbini dan menggantikannya dengan Pelaksana Tugas Alimin Abdullah selama sisa jabatannya sebagai DPW PAN Lampung. Penggantian DPW PAN ini dilakukan setelah adanya evaluasi kinerja yang dirasa kurang mengkoordinasi di dalam tubuh Partai Amanat Nasional.

Ketua DPP PAN Jon Cik Muhammad menyampaikan kebijakan pemberhentian ketua DPW PAN Lampung secara langsung kepada wartawan usai memberikan SK DPP PAN Nomor: 121/XII/2012 tentang pemberhentian yang dimaksud. Menurutnya, pemberhentian tersebut dilakukan setelah DPP PAN mengadakan evaluasi terhadap kinerja Abdurachman Sarbini tersebut selama masa kepemimpinannya.

Jon Cik Muhammad menyebutkan dua hal yang menjadi parameter utama pemberhentiannya tersebut adalah disiplin partai dan asas kepatutan yang pada masa kepemimpinan Mance banyak dilanggar. Roda organisasi menjadi tidak maksimal dan apabila diteruskan dapat mengancam elektabilitas PAN pada Pemilu 2014. Jon Cik juga optimis bahwa pemberhentian tersebut tidak akan

berpengaruh banyak terhadap target perolehan suara PAN 2014 khususnya di daerah Lampung. Jon Cik menjelaskan upaya tersebut dilakukan untuk mendukung program nasional PAN dalam perolehan suara pada pemilu 2014.

Menurut Jon Cik, pemberhentian Mance itu sudah ditandatangani sejak 10 Desember 2013, namun SK pemberhentian baru bisa disampaikan belum lama ini kepada kader dan pengurus PAN di Lampung. Jon Cik dengan dua ketua DPP lainnya telah menemui Mance Jumat (31/1) malam dan meyakini tidak akan ada aksi lanjutan menyusul kebijakan pemberhentian tersebut, seperti aksi besar-besaran kader PAN yang loyal terhadap Mance ataupun membersihkan pendukungnya dari pengurus PAN Lampung. Jon Cik menegaskan tidak akan ada Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) PAN Lampung hingga Juni 2015 dan jabatan Alimin sebagai Pelaksana Tugas (PLT) ketua DPW PAN Lampung akan berakhir saat Mance secara normal juga berakhir (<http://m.antaralampung.com/berita/417173/dpp-pan-berhentikan-ketua-dpw-pan-lampung>, diakses pada 10 Februari 2014).

Alimin Abdullah anggota DPR RI asal Lampung resmi menjabat Pelaksana Tugas (PLT) ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung, menggantikan Abdurahman Sarbini, pergantian ini berdasarkan surat DPP PAN tentang pemberhentian ketua DPW PAN Lampung dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ketua DPW PAN Provinsi Lampung periode 2010-2015. Pergantian ketua DPW PAN Lampung ini berdasarkan surat keputusan No.PAN/A/KPTS/KU-SJ/121/XII/2013 tertanggal 28 Desember 2013. Konflik

internal partai politik dibutuhkan upaya penyelesaian konflik dengan cara mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan dari cita-cita dan kehendak yang sama dalam hal ini mewujudkan partai politik yang dapat memajukan kesejahteraan ([http://www.kupastuntaslampung.com/?Page=berita & no=11389](http://www.kupastuntaslampung.com/?Page=berita&no=11389), diakses pada 10 februari 2014).

Meskipun konflik tersebut bersifat internal, konflik yang terjadi pada Partai Amanat Nasional merupakan cerminan partai politik saat ini yang tidak peduli lagi dengan tujuan utama dari partai politik. Sikap pragmatis masih mendominasi para kader-kader partai politik. Visi, misi dan *platform* partai bisa dengan mudah diabaikan hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui apa penyebab konflik, bentuk dan pengaruh konflik terhadap kader di internal Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga perlu adanya pemberhentian Abdurachman Sarbini sebagai Ketua Dewan pimpinan wilayah (DPW) Provinsi Lampung. Hal itu yang ingin diteliti peneliti dalam penelitian. Seperti yang diketahui bahwa banyak sekali konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai, namun PAN merupakan partai yang menarik untuk diteliti karena partai ini telah lama berdiri namun masih saja terjadi konflik di dalamnya.

Ada beberapa penelitian lain berupa skripsi dan jurnal penelitian mengenai konflik internal partai. Tetapi, penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan

penelitian tersebut meskipun sama-sama penelitian tentang konflik internal partai.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Skripsi Nurul Radiatul Adawiah Tahun 2013 dengan Judul “Konflik Internal Partai Nasdem” (Studi Tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Perbedaan pertama, menurut Adawiah (2013: 5) dalam penelitiannya membahas tentang perbedaan pandangan dalam pengisian jabatan ketua umum, konflik di internal partai tersebut berimbas sampai ke pembekuan ketua DPW Sul-sel yang sampai pada akhirnya adanya pemberhentian. Berbeda dengan masalah dalam penelitian ini, mengenai konflik internal partai yang menyebabkan Abdurachman Sarbini diberhentikan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Lampung.

Kedua, Duverger dalam Adawiah (2013: 49) teori yang digunakan adalah teori penyebab konflik dari yang menjelaskan konflik disebabkan oleh sebab-sebab individu dimana ada kecenderungan berkompetisi serta sikap ketidakpuasan terhadap pekerjaan orang lain dan sebab-sebab kolektif dimana penyebab konflik terbentuk dari kelompok yang merupakan hasil dari interaksi sosial mengenai ancaman dari luar kelompok. Sementara Fisher dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori penyebab konflik, tiga diantaranya yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori identitas. Serta

Diamond dalam Adawiah (2013: 25) mengenai konsep partai politik yang dalam skripsi Nurul Radiatul Adawiah. Berbeda halnya penelitian ini menurut Friedrich, Soltau, Neuman dalam Sitepu (2012: 188), dimana dalam penelitian ini menggunakan karangan tiga ahli tersebut.

Ketiga, perbedaan penggunaan metode penelitian dalam skripsi Nurul Radiatul Adawiah adalah penelitian deskriptif analisis dimana menganalisis dua masalah yaitu diarahkan dan dapat menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meneliti keadaan yang alamiah dan pengumpulan data secara triangulasi, bersifat induktif dan menekankan pada regenerasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, berbeda dengan penelitian ini yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tulisan Deny Rendra dan Hary Suryadi Tahun 2012 dengan Judul “Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 10, Nomer 2, Desember 2012, Halaman 67-147.

Perbedaan pertama tulisan Rendra (2012: 73) membahas proses pergeseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yang merupakan konflik murni yang dilakukan elit partai dikarenakan ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan, ketidakjelasan mengenai batas-batas wewenang serta akan tanggungjawab. Kelompok-kelompok yang berkonflik

tersebut merupakan kelompok lama yang kemudian mereka fragmentasikan dalam perebutan kekuasaan DPD Partai Demokrat Riau. Hal ini disebabkan rendah pengaruh pemberitaan media massa terkait permasalahan yang terjadi, pengaruh kelompok kepentingan yang mengambil keuntungan dari permasalahan ini serta rendahnya pembinaan dari DPP terhadap DPP-DPP dan DPC-DPC termasuk di Riau.

Pada penelitian ini masalah yang diteliti adalah konflik internal Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Lampung dalam pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Abdurachman Sarbini yang dilakukan dengan Pelaksana Tugas (PLT) Alimin Abdullah, dilatarbelakangi pelanggaran yang dilakukan Abdurachman Sarbini selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang dianggap dapat mengancam elektabilitas PAN khususnya di Lampung. Hal tersebut yang ingin diketahui konflik murni timbul di tubuh partai atau intervensi dari pihak lain.

Kedua, Nauman dalam Rendra (2012: 74) menggunakan teori sebab internal dan sebab eksternal yang secara umum disebabkan oleh konflik antar kelompok yang tidak terakomodasinya kepentingan elit dikarenakan sistem kaderisasi yang kurang baik dan lemahnya kepemimpinan dalam pengelolaan. Berbeda halnya dengan Fisher dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) teori dalam penelitian ini adalah teori penyebab konflik, tiga diantaranya yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori identitas.

Ketiga metode yang digunakan Rendra merupakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di DPD Partai Demokrat Riau. Sumber informasi dilakukan dengan primer secara teknik *purposive informan* serta data yang dikumpulkan dengan cara teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini penelitian menggunakan metode kualitatif yang meneliti keadaan yang alamiah dan pengumpulan data secara triangulasi, bersifat induktif, dan menekankan pada regenerasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, berbeda dengan penelitian ini yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tulisan Luluk Rofiqotul Isyaroh Tahun 2012 dengan Judul “Konflik di DPP PKB (Studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di DPC PKB Kota Kediri)”, Jurnal Politik Muda, Vol 2, Nomor 1, Januari-Maret 2012, Halaman 96-106.

Perbedaan pertama, Isyaroh (2012: 104) membahas tentang pemberhentian Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar yang dianggap tidak bijaksana dan sepihak. Bahkan sikap otoriter Gus Dur sebagai ketua Dewan Syuro dianggap menjadi penyebab konflik. Ditambah lagi dengan konflik yang terus menerpa PKB yang dilakukan Manthori Abdul Djalil dan Alwi Shihab, dimana setiap konflik berdampak pada keberadaan Kyai baik yang di dalam struktur maupun di luar partai yang berimbas juga pada tingkat kepala daerah. Perpecahan di DPP PKB berdampak pada DPC kota Kediri, yang adanya pembekuan pengurus DPC oleh kubu Gus Dur yang mana memang

satu-satunya pendiri PKB dan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro adalah Gus Dur. Berbeda dengan penelitian ini yang ingin mengetahui penyebab pemberhentian Abdurachman Sarbini sebelum habis masa kepemimpinannya tersebut murni konflik internal partai atau adanya intervensi dari kelompok luar.

Kedua, Layman dalam Isyaroh (2012: 102) menggunakan teori budaya dan perilaku agama. Sementara Fisher dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) teori penelitian ini adalah teori penyebab konflik, menyebutkan tiga diantaranya yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori identitas.

Ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian Isyaroh sama dengan penelitian ini, dimana sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana terjadinya konflik internal Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Lampung tahun 2013 terhadap pemberhentian Abdurachman Sarbini?

2. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi di Partai Amanat Nasional?
3. Bagaimana pengaruh konflik terhadap konsolidasi partai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik internal Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Lampung tahun 2013 terhadap pemberhentian Abdurachman Sarbini?
2. Untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi di Partai Amanat Nasional?
3. Untuk mengetahui pengaruh konflik terhadap kader PAN?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan konflik internal partai politik.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai informasi bagi pembelajaran partai politik lainnya dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik secara demokratis.